

Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

**Yogi Gumilar Saaeful Akbar^{1)*}, Bambang Rudiansah²⁾, Tubagus Iqbal Alfiansyah³⁾
Elvira Aprilla Anzani⁴⁾**

Prodi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Langlang Buana, Indonesia¹²³⁴

Email: yogi.gumilar@unla.ac.id Rudiansahb79@gmail.com
tubagusiqbal3@gmail.com elvira@unla.ac.id

Received: April 6, 2026 | Accepted: April 23, 2026 | Published: July 24, 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Fokus penelitian ini menggunakan model teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparat pemerintah desa, pengelola wisata, serta masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pasirmulya belum berjalan efektif. Hambatan utama terletak pada kurangnya sosialisasi kebijakan, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pembentukan struktur birokrasi yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Desa Wisata, Kabupaten Bandung

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of policy implementation for the development of Pasirmulya Tourism Village, Banjaran Sub-district, Bandung Regency. The research applies George C. Edwards III's policy implementation model, which consists of four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A qualitative descriptive method with a case study approach was used, involving observation, interviews, and documentation with local government officials, tourism managers, and community members. The results indicate that the implementation of the tourism village development policy has not been effective. The main obstacles include lack of communication, limited human and financial resources, weak coordination among institutions, and the absence of standardized operational procedures (SOP). To enhance effectiveness, improvements are needed in communication mechanisms, human resource capacity building, and the establishment of an adaptive and collaborative bureaucratic structure.

Keywords: Policy Implementation, Tourism Village Development, Bandung Regency

PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata di Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi masyarakat

pedesaan. Melalui program “Desa Wisata Juara”, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengoptimalkan potensi lokal agar mampu menjadi daya tarik wisata yang berdaya saing

60 *Corresponding author.

E-mail: yogi.gumilar@unla.ac.id

serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah dengan potensi wisata alam dan budaya yang melimpah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Namun, berbagai potensi wisata yang ada masih memerlukan peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat adalah konsep Desa Wisata, yang menekankan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan pengelolaan destinasi wisata. Melalui pelibatan masyarakat, pengembangan desa wisata diharapkan mampu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan seperti peningkatan pendapatan, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Namun demikian, meskipun masyarakat Desa Pasirmulya memiliki budaya gotong royong yang menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang cukup kuat, partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata masih belum optimal dan belum terorganisir secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa wisata masih memerlukan penguatan, khususnya dalam mendorong partisipasi aktif dan berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata, serta Keputusan Bupati Bandung Nomor 556/Kep.770-Disbudpar/2022, Desa Pasirmulya di Kecamatan Banjaran ditetapkan sebagai salah satu desa wisata rintisan. Desa ini memiliki potensi alam, budaya, dan sejarah yang kuat, seperti keindahan Gunung Puntang dan situs

Radio Malabar, serta aktivitas pertanian dan perkebunan kopi yang menjadi daya tarik tersendiri. Namun, realisasi program pengembangan desa wisata Pasirmulya belum berjalan optimal.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain kurangnya sosialisasi antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, pengelolaan oleh aparat desa dan kelembagaan seperti BUMDes juga masih belum optimal sehingga pelaksanaan program pengembangan desa wisata belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan desa wisata Pasirmulya masih menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya efektif, meskipun terdapat potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengembangan desa wisata Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III dalam Widodo (2010:96). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan strategi pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi lokal secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek serta hasil yang ingin dicapai, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan desa wisata. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial yang terjadi secara alami tanpa manipulasi data.

Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif bertujuan memahami makna yang tersembunyi di balik perilaku manusia, pengalaman, atau kebijakan tertentu dengan melihat realitas secara holistik. Sementara Hendryadi et al. (2019:218) menegaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang berfokus pada makna dan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Desa Wisata Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dalam Widodo (2010:96), peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pasirmulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu;

1. Komunikasi;
2. Sumber daya;
3. Disposisi;
4. Struktur birokrasi.

Dari aspek komunikasi, proses sosialisasi kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah desa bersama pihak terkait, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep desa wisata dan

pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan. Meskipun masyarakat memiliki budaya gotong royong yang kuat sebagai bentuk kesadaran kolektif, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya terarah pada pengembangan desa wisata secara sistematis. Selain itu, ketimpangan distribusi bantuan sosial juga memicu kecemburuan sosial yang berdampak pada rendahnya keterlibatan sebagian masyarakat. Namun demikian, pendekatan personal yang dilakukan pemerintah desa serta dukungan dari akademisi mulai mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara bertahap.

Dari aspek sumber daya, Desa Pasirmulya memiliki potensi wisata alam dan budaya yang cukup besar, seperti camping ground dan pementasan seni Tangkas Adu Domba yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong menunjukkan adanya modal sosial yang cukup kuat sebagai pendukung pengembangan desa wisata. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur, anggaran, serta kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

Pada aspek disposisi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa wisata mulai terbentuk, namun belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan. Pengelolaan oleh aparat desa dan

kelembagaan seperti BUMDes juga belum berjalan maksimal sehingga membutuhkan pendampingan lebih lanjut agar peran kelembagaan dapat berjalan lebih efektif. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan menjadi potensi positif yang dapat mendukung pengembangan desa wisata berbasis keberlanjutan.

Dalam aspek struktur birokrasi, belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) secara lengkap menjadi tantangan dalam menciptakan konsistensi dan transparansi pengelolaan desa wisata. Selain itu, koordinasi lintas sektor antar instansi dan lembaga terkait masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Kolaborasi dengan dinas terkait, kementerian, serta akademisi telah dilakukan, namun masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal, terutama dalam penyediaan pelatihan dan bantuan infrastruktur.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pasirmulya masih belum berjalan optimal dan masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, penyusunan SOP yang jelas, serta pendekatan partisipatif yang lebih terarah dalam melibatkan masyarakat. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah desa, masyarakat, akademisi, dan instansi terkait menjadi

faktor penting dalam mewujudkan pengembangan desa wisata yang mandiri, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dalam Widodo (2010:96), implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pasirmulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan telah dilakukan namun belum optimal sehingga pemahaman dan partisipasi masyarakat masih terbatas, meskipun terdapat budaya gotong royong sebagai modal sosial yang belum terarah secara sistematis serta adanya kecemburuan sosial akibat ketimpangan distribusi bantuan. Dari aspek sumber daya, Desa Pasirmulya memiliki potensi wisata alam dan budaya seperti camping ground dan seni Tangkas Adu Domba, namun keterbatasan infrastruktur, anggaran, dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama sehingga diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Pada aspek disposisi, partisipasi masyarakat mulai terbentuk tetapi belum optimal, sementara pengelolaan oleh aparat desa dan BUMDes masih membutuhkan pendampingan. Dalam aspek struktur birokrasi, belum tersusunnya SOP serta koordinasi lintas sektor yang belum maksimal menjadi hambatan implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pasirmulya belum berjalan optimal sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP, serta

kolaborasi yang sinergis guna mewujudkan desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Yuliana, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(1), 22–36.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. (2022). Laporan Tahunan Program Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Bandung. Bandung: Disbudpar.
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Kurniawan, R. (2023). *Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata*. Bandung: CV Mandiri Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyana, D., & Rahmat, N. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Wisata di Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(2), 101–115.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pemerintah Kabupaten Bandung. (2020). Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata. Bandung: Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
- Pemerintah Kabupaten Bandung. (2022). Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 556/Kep.770-Disbudpar/2022 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Bandung. Bandung: Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
- Prawira, D., Setiawan, I., & Lestari, F. (2022). Kopi Puntang sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, 8(2), 45–56.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wearing, S. (2001). *Volunteer Tourism: Experiences That Make a Difference*. Wallingford: CABI Publishing.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publish